

**MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
BERBASIS MASYARAKAT DI MTs PAKIS KECAMATAN
CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)**

Oleh

**NUR FADILAH
NIM. 1522401073**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang bermutu, dalam arti menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan masyarakat, baik dari moral, kualitas diri, pengetahuan maupun kompetensi kerja menjadi syarat mutlak dalam kehidupan masyarakat global yang terus berkembang. Pendidikan memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan insan yang berkualitas. Oleh karena itu kualitas mutu pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan agar harapan tersebut terwujud.

Pendidikan juga merupakan sebuah aktifitas yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat dengan sepenuhnya. Selain itu, pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang menjadi suatu kewajiban bagi orangtua untuk mendidik anaknya, pendidikan adalah hak bagi seluruh warga negara tanpa membedakan asal usul, status sosial maupun fisik seseorang karena pada dasarnya, pendidikan adalah suatu proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran. Selain itu pendidikan pada esensinya merupakan sebuah upaya dalam rangka membangun kecerdasan manusia, baik kecerdasan kognitif, afektif, maupun psikomotor. Oleh karena itu pendidikan secara terus menerus dibangun dan dikembangkan agar proses pendidikan menghasilkan generasi yang unggul ; unggul dalam ilmu, iman dan amal.¹

Pendidikan merupakan salah satu upaya mewujudkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi

¹ Novan Ardy Wiyani, *Pendidikan Karakter Snsk Konsep Dan Implementasi Di SD Dan MI*, (Purwokerto: STAIN Press, 2018) Hlm 4.

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Lembaga pendidikan seperti organisasi sekolah merupakan kerangka kelembagaan dimana administrasi pendidikan dapat berperan dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dilihat dari tingkatan-tingkatan suatu organisasi, administrasi pendidikan dapat dilihat dalam tiga tingkatannya yaitu tingkatan institusi (*institutional level*), tingkat manajerial (*managerial level*), dan tingkatan teknis (*technical level*). Tingkatan institusi berkaitan dengan hubungan antara lembaga pendidikan (sekolah) dengan lingkungan eksternal, tingkatan manajerial berkaitan dengan kepemimpinan, organisasi lembaga (sekolah), dan tingkatan teknis berkaitan dengan proses pembelajaran.²

Sekolah sebagai organisasi penyedia layanan pendidikan kepada masyarakat senantiasa dihadapkan dengan tantangan dalam mencapai tujuan atau cita-citanya. Pengelolaan sekolah dilakukan dengan menggunakan kerangka pikir manajemen, yang tergambar dari rangkaian kegiatan yang terdiri atas merencanakan, mengorganisasikan, menempatkan staf, memberikan arahan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan dan staf. Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan memegang peranan mendasar karena membantu pengelola organisasi memperkirakan hambatan/tantangan pencapaian tujuan dan menentukan tindakan sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut.

Manajemen adalah sebuah proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan oleh pihak pengelola organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.³ Manajemen pendidikan memiliki beberapa substansi yaitu manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan masyarakat, manajemen personal, dan manajemen keuangan.

² Eka Prihatin, *Teori Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014) Hlm 7

³ Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen, Negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4.

Setiap penyelenggaraan suatu kegiatan membutuhkan adanya biaya atau uang untuk dapat terselenggaranya suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Uang dalam organisasi dapat diibaratkan sebagai bahan baku dalam sebuah perusahaan, dimana sebuah perusahaan tidak akan bisa melakukan proses produksi jika tidak ada bahan baku tersebut. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, hampir bisa dikatakan semuanya membutuhkan adanya uang atau biaya. Pembicaraan tentang biaya penyelenggaraan pendidikan, pada umumnya dibatasi pada pemahaman seberapa nominal yang harus dibayarkan oleh orangtua siswa. Pemahaman semacam ini memang tidak selamanya salah, oleh karena konsep biaya memang berkaitan dengan pengeluaran, namun jika hal ini kemudian dikaitkan dengan masalah penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah, maka proses administrasi tentang pembiayaan ini menjadi penting adanya untuk dipelajari, apalagi bagi guru dan para penyelenggara pendidikan.⁴

Masalah biaya pendidikan adalah masalah mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyelenggaraan pendidikan juga bersentuhan dengan masalah sarana dan prasarana dan pembiayaan yang lainnya seperti intensif, gaji, dan honorarium. Untuk tercapainya pendidikan yang berkualitas, diperlukan adanya dukungan dan

⁴ Muh. Hizbul Muflikhin, *Administrasi Pendidikan Tinjauan Teori Untuk Praktek Manajerial Bagi Guru Dan Pimpinan Sekolah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2013) 263

peran serta dari semua pihak terutama yang menyangkut masalah pembiayaan pendidikan.

Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat, maupun orangtua (keluarga) untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi. Uang yang dikeluarkan di bidang pendidikan sebagai bentuk investasi pada periode tertentu, dimana yang akan datang harus dapat menghasilkan keuntungan (*bebefit*) atau manfaat, baik dalam bentuk uang (*financial*) maupun non-financial. Dalam bentuk uang yang diperoleh sebagai balas jasa atas produktivitas tenaga kerja dan dalam bentuk non-finansial nilai-nilai, seperti meningkatkan kesehatan, keamanan atau keterlibatan masyarakat, baik dari aspek individu, sosial, maupun ekonomi.⁵

Pendidikan memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Karena manfaatnya yang begitu luas dan dapat meresap ke berbagai bidang, maka pembiayaan pendidikan seyogyanya harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat.⁶

Masalah pembiayaan tidak terlepas dari ikut campurnya masyarakat dalam proses pendanaan, masyarakat yang terlibat dalam suatu sekolah akan mengeluarkan biaya demi keberlangsungan suatu proses yang ada di sekolah. Karena dalam mewujudkan visi dan misi sekolah sesuai dengan paradigma baru manajemen pendidikan, disarankan perlunya pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekolah secara optimal. Hal ini penting karena sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program, salah satunya program manajemen pembiayaan. Hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat ini semakin dirasakan pentingnya pada masyarakat yang telah

⁵ Nanang Fattah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Roskarya, 2002) Hlm 6

⁶ Nanang Fattah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002)

memahami dan menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Namun tidak berarti pada masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya pendidikan, hubungan kerja sama ini tidak perlu dibina.

Pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan karena segala kegiatan pendidikan tentu memerlukan dana atau biaya. Biaya pendidikan bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan, terutama pada saat tahun ajaran baru. Meskipun anggaran biaya pendidikan bukan satu-satunya penentu agar pendidikan lebih berkualitas. Tanpa biaya yang memadai sulit rasanya pendidikan dapat dirasakan oleh semua kalangan.⁷

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orangtua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Nanang Fattah mendefinisikan biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.⁸

Biaya pendidikan akan di tentukan oleh komponen kegiatan pendidikan meliputi pengadaan sarana dan prasarana , biaya satuan. Menurut pendekatan sistem, biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme

⁷ Novan Ardy Wiyani, Desain Manajemen Pendidikan Karakter Di Madrasah, *INSANIA* Volume. 17. No, 1, Januari-April 2012

⁸ Nanang Fattah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan....*Hlm 112

penganggaran, penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai tujuan tertentu.⁹

Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa tidak semua kalangan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas karena mahal biaya yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 80 ayat 1 yang berbunyi, ” anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya.

Pembiayaan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran bersama komponen yang lain. 7 Komponen-komponen pembiayaan pendidikan terutama di madrasah, selayaknya dikelola secara efektif. Pembiayaan pendidikan yang ada di madrasah diatur, direncanakan, dan dipergunakan secara baik dan tepat sasaran dan kebutuhan. Kenyataan yang ada, sebagian besar lembaga pendidikan Madrasah Swasta saat ini masih menerapkan pola-pola manajemen yang sangat sederhana dalam mengelola dana yang bersumber dari masyarakat/orang tua. Firdaus dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sistem pembiayaan yang efektif dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu dan menjamin kelangsungan hidup lembaga pendidikan swasta.

Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.¹⁰

Dalam konteks tersebut, Sulistyorini menegaskan bahwa keuangan atau pembiayaan merupakan sumber dana yang diperlukan oleh setiap lembaga

⁹ Moch.Idori Anwar, *Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya Pendidikan Eidsi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

¹⁰ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah , Konsep, Strategi Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002)

pendidikan sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan, pelaksanaan program supervisi, dan kebutuhan operasional lembaga pendidikan lainnya, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan hal vital bagi sebuah lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, karena kegiatan pendidikan yang berkualitas tentunya memerlukan sebuah penanganan dalam segi finansial yang memadai di mana hal tersebut erat kaitannya dengan sumber pendanaan atau pembiayaan pendidikan yang kuat pula.

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber-sumber dananya tetapi juga penggunaan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan, maka semakin berkurang biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya (Zemelman). Senada disampaikan oleh Akbar mengenai efisiensi menyatakan bahwa efektifitas pendidikan menggambarkan tingkat kesesuaian antara jumlah keluaran yang dihasilkan dengan jumlah yang ditargetkan. Maka masalah efektifitas biaya pendidikan mempunyai kaitan langsung dengan upaya untuk mengetahui apakah sejumlah biaya tertentu dapat menghasilkan pendidikan yang telah ditentukan. Sesuatu disebut efektif apabila sesuatu itu dikerjakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian sekolah efektif adalah suatu program yang dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Bagi Indonesia, jaminan akses terhadap pendidikan sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang direncanakan, dikelola dan diorganisir secara baik dan tepat sasaran akan menunjang terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif serta dapat memenuhi kebutuhan sekolah.¹¹

Firdaus dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sistem pembiayaan yang efektif dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu dan menjamin

¹¹ Zulfa Jamalie, 2017, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat: Studi Pada Mts Darul Ulum Palangka Ray, *FENOMENA*, Volume 9, No 1

kelangsungan hidup lembaga pendidikan swasta. Sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari peserta didik merupakan potensi besar dalam melaksanakan manajemen pendidikan serta merupakan modal bagi keberlangsungan pendidikan. Sistem pengelolaan dan manajemen penggalan dana pembiayaan pendidikan supaya difokuskan pada upaya strategi kemitraan.

Sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari peserta didik merupakan potensi besar dalam melaksanakan manajemen pendidikan serta merupakan modal bagi keberlangsungan pendidikan. Sistem pengelolaan dan manajemen penggalan dana pembiayaan pendidikan supaya difokuskan pada upaya strategi kemitraan. Harsono, pembiayaan pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah, biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua siswa, biaya pendidikan yang bersumber dari sponsor dan perusahaan serta biaya pendidikan yang bersumber dari lembaga pendidikan itu sendiri. Sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah tidak menjadi jaminan bagi peningkatan mutu, jika tidak direncanakan, salah sasaran, salah pengelolaan, tidak ada pengawasan, akuntabilitas rendah, sanksi yang tidak tegas yang diberikan bagi penyeleweng, sehingga tidak ada efek jera dan moral yang rendah, dan alasan lainnya dalam pengelolaan biaya pendidikan.

Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi pembiayaan. Manajemen biaya pendidikan sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Beragam sumber yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan pembiayaan yang profesional dan jujur.

Mengingat pentingnya peran pembiayaan dalam proses pembelajaran, maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola pembiayaan yang baik dalam penganggaran pendidikan. Tata kelola keuangan ini selanjutnya disebut dengan manajemen pembiayaan. Terkait dengan pembiayaan pendidikan, banyak

masalah yang muncul yaitu, minimnya anggaran pendidikan, penyimpangan dalam penyaluran dana pendidikan, dan alokasi dana yang belum memadai.

Manajemen pembiayaan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam implementasinya di sekolah, manajemen pembiayaan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan pembiayaan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan, atau pengendalian.¹² Manajemen pembiayaan merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan meng-evaluasi serta mempertanggung jawabkannya secara transparan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen pembiayaan perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana, dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

Tujuan adalah untuk mewujudkan tertibnya administrasi pembiayaan sehingga penggunaan keuangan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manajemen pembiayaan memiliki aturan tersendiri, terdapat pemisah tugas dan fungsi antara otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang diharapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah pencapaian visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan.

¹² Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: PT Gajah Grafindo, 2014) hlm 163

Inti dari manajemen pembiayaan dalam lembaga pendidikan atau sekolah adalah menggali dana secara kreatif dan maksimal, menggunakan secara jujur, dan mempertanggungjawabkan semua dana yang ada secara objektif. Bila ini benar-benar diterapkan, maka manajemen keuangan akan membantu kemajuan lembaga pendidikan atau sekolah secara maksimal.¹³

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola suatu pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan sistem perencanaan yang matang, agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah. Semua ini akan sangat dipengaruhi oleh pembiayaan dalam pendidikan, baik tingkat nasional dan daerah. Pembiayaan sebagai salah satu komponen sistem pendidikan memerlukan kajian pemikiran yang lebih mendalam dan penelitian yang lebih cermat, supaya untuk menggunakan dana-dana yang tersedia secara tepat. Model pembiayaan yang ideal di suatu daerah sangatlah tergantung pada berbagai kondisi. Boleh jadi dengan memilih salah satu ataupun dengan mengombinasikan dua atau lebih dari model yang ada. Untuk kondisi Indonesia, model pembiayaan tidak bisa terlepas dari subsidi pemerintah pusat, sekalipun telah ada wewenang sebagaimana diamanatkan UU Otonomi Daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya alam yang sangat berbeda atau penghasilan (PAD) yang sangat rendah, kesadaran ada pembangunan investasi pendidikan masih tanda tanya, dan berbagai faktor lainnya.

Mahalnya biaya pendidikan mungkin sering dirasakan oleh banyak orangtua siswa. Tapi berbeda bagi siswa Madrasah Tsanawiyah PAKIS di Kecamatan Cilongok Banyumas, Jawa Tengah. Orangtua hanya perlu membawa hasil pertanian seikhlasnya untuk mendaftarkan anaknya sekolah. bukan hendak ke pasar, puluhan orangtua yang menenteng beragam hasil bumi ini justru akan mengantar anaknya mendaftar sekolah. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Madrasah Tsanawiyah PAKIS di dusun terpencil pesawahan Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini tidak memungut

¹³ Dosen Poltekpar, 2017, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu, *Jurnal Ansiru PAI* Vol. 1 No. 2

uang sebagai biaya pendaftaran. Sebagai gantinya, orangtua siswa membawa singkong, ubi jalar, talas, kelapa, pisang, dan sayuran untuk diserahkan ke sekolah.

MTs PAKIS ini memang lokasinya jauh dari kota. Dusun pesawahan hanya dihuni sekitar 20 keluarga yang sebagian besar adalah petani. Siswa yang diperbolehkan mendaftar beragam, mulai dari anak yang baru lulus SD hingga remaja yang pernah putus sekolah. Sementara, gurunya merupakan para relawan yang tanpa mendapat honor pun mau mengajar. Terkendala lokasi dusun yang jauh dari kecamatan dan kota, sekolah gratis ini menjadi satu-satunya tumpuan anak-anak dusun untuk menuntut ilmu. Warga sekitar berharap MTs PAKIS bisa terus bertahan dengan caranya yang cukup langka.

Berdasarkan observasi pendahuluan dan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Kepala Sekolah MTs Pakis, sekolah tersebut awalnya merupakan sekolah alternatif yang didirikan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Argowilis yang peduli terhadap pendidikan anak-anak pinggir hutan pada tahun 2013. Konsep awal sekolah tersebut adalah mengajak anak-anak pinggir hutan yang rata-rata berasal dari keluarga tidak mampu untuk bersekolah.

Menurut Bapak Isrodin selaku kepala sekolah mengatakan, operasional sekolah sampai saat ini tergantung pada swadaya para relawan dan penjualan hasil pertanian yang di kelola siswa. Beliau menerangkan, tiap tahun MTs PAKIS memang menerapkan kebijakan yang ringan untuk calon siswanya. Tujuannya agar anak-anak yang berada di pinggir hutan Gunung Slamet ini memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan anak-anak yang berada di wilayah utama desa atau perkotaan. Keterlibatan masyarakat dan orang tua sangat penting untuk mendukung pendidikan anak-anak. Itu karena pemahaman masyarakat plosok desa terkait pentingnya pendidikan masih sangat terbatas. Orangtua akan membiarkan dan memaklumi anak-anaknya memilih putus sekolah untuk bekerja atau menikah muda. Kebijakan unik dan terjangkau seperti ini juga dilaksanakan pada tahun 2017 lalu, dimana orang tua siswa membawa alat pertanian. Tahun sebelumnya, 2016, calon siswa cukup membawa benih tanaman, hal yang tak

mudah dilakukan untuk menjaga semangat agar siswa tetap punya keinginan sekolah.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan MTs PAKIS dalam mengoptimalkan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di MTs PAKIS Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas”

B. Definisi Operasional

Sebelum membahas penelitian ini lebih lanjut, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang di pakai dalam judul penelitian dengan tujuan agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang di bahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu di perjelaskan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Model Manajemen pembiayaan pendidikan

Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa menyederhanakan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa fisik (maket, prototipe). Model citra (gambar rancangan, citra komputer) atau rumusan matematika).¹⁴

Manajemen keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan.¹⁵

Pembiayaan pendidikan merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pada kegiatan-kegiatan atau program-program

¹⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/model>

¹⁵ Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2017) Hlm 181

pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal-hal yang berkaitan dengan ini meliputi: perencanaan anggaran pendidikan, pembiayaan pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan. Jadi dapat disimpulkan manajemen pembiayaan pendidikan adalah suatu proses kerjasama antara individu dengan kelompok serta dalam pengelolaan pembiayaan pada kegiatan-kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan.

2. Pembiayaan Berbasis Masyarakat

Pembiayaan berbasis masyarakat merupakan pembiayaan yang mana segala hal yang terkait di dalamnya lebih banyak melibatkan masyarakat dari pada keterlibatan atau campur tangan pemerintah. Dalam bidang pendidikan, pembiayaan berbasis masyarakat sangat mendukung keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan dalam proses keberlangsungan pendidikan. Pembiayaan berbasis masyarakat pada dasarnya dikembangkan dan dilaksanakan dari masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Contoh dari pembiayaan berbasis masyarakat ialah pembiayaan yang dilaksanakan oleh MTs PAKIS, karena mereka mengandalkan kebun atau sawah masyarakat dalam proses belajar di bidang pertanian.

3. MTs PAKIS Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

MTs PAKIS terletak di dusun terpencil jauh dari perkotaan. Beralamat di desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Salah satu keunikan dari sekolah ini adalah sekolah berbasis madrasah yang menerapkan sistem pembiayaan dengan hasil bumi atau hasil panen petani. Sekolah tersebut sangat membantu masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya tetapi tidak mempunyai biaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah :

“Bagaimana Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di MTs PAKIS Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara deskripsi penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengenal manajemen pembiayaan pendidikan di MTs PAKIS Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah hasanah pustaka bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan khususnya jurusan Manajemen Pendidikan Islam.
- 2) Manfaat bagi lembaga yakni kampus IAIN Purwokerto adalah dapat memberikan referensi bagi perpustakaan IAIN Purwokerto. Khususnya untuk mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Kepala Sekolah

Memberikan masukan dan pemikiran yang transformatif tentang manajemen pembiayaan pendidikan agar dalam melaksanakan dan mengelola lebih efektif dan efisien. Selain itu sebagai sumber tambah wawasan, bahan introspeksi sudah sejauh mana kontribusi dalam manajemen pembiayaan pendidikan yang telah dilaksanakan.

2) Bagi Relawan

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya manajemen pembiayaan pendidikan. Serta sebagai bahan renungan dan motivasi bagi relawan dalam usaha meningkatkan partisipasinya untuk meningkatkan pendidikan.

3) Bagi Masyarakat

Menambah wawasan bagi masyarakat dan dengan penelitian, masyarakat menjadi tau solusi yang tepat untuk memecahkan masalah.

4) Peneliti Lain

Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan kajian dengan tema terkait.

E. Kajian Pustaka

Penulis melakukan penelusuran buku dan karya ilmiah lainnya. Yang berkaitan dengan pembahasan skripsi untuk dijadikan sebagai sumber acuan dari pembahasan ini.

Alfi Miftakhul Hidayati menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul *Manajemen Keuangan Pondok Pesantren At-Taujiah Al-Islamy Leler Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas* bahwa Manajemen keuangan Pondok Pesantren At-Taujiah Al-Islamy Leler dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, beserta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pondok Pesantren. Implementasi manajemen keuangan di Pondok Pesantren At-Taujiah Al-Islamy Leler belum berjalan dengan baik dan tidak sistematis, hal ini dibuktikan dengan proses manajemen keuangan belum sesuai dengan teori-teori yang berkaitan dengan proses pelaksanaan keuangan. Masih banyak pos-pos anggaran yang belum dimasukkan dalam laporan keuangan, termasuk juga penutupan kekurangan anggaran oleh pengasuh pondok tidak dimasukkan ke dalam laporan dan tidak disebut sebagai hutang. Laporan masih sangat sederhana, hanya berisi anggaran dan realisasi pendapatan, laporan belanja, beserta realisasi kegiatan/program pondok pesantren. Selanjutnya hambatan-hambatan dalam manajemen keuangan di Pondok Pesantren At-Taujiah Al-Islamy Leler, yaitu kurangnya tenaga profesional terkait pengelolaan keuangan, sistem keuangan pondok pesantren dan sekolah yang masih digabung antara keuangan pondok, sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Cara mengatasi kendala-kendala manajemen keuangan di Pondok Pesantren At-Taujiah Al-Islamy Leler adalah dengan memfungsikan kembali bendahara pada struktur organisasi yang ada, bendahara SMP, dan bendahara SMA harus dipisahkan, sehingga bendahara dengan mudah mengelolah data keuangan dengan baik dan sistematis.¹⁶

Nur Khanan dalam skripsinya yang berjudul *Model Manajemen Keuangan Pendidikan Di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Kembaran*

¹⁶ Alfi Miftakhul Hidayah, *Manajemen Keuangan Pondok Pesantren At-Taujiah Al-Islamy Leler Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas*, (Puwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2019)

Banyumas Tahun 2016, menjelaskan bahwa manajemen keuangan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Kembaran Banyumas sudah berjalan dengan baik dari mulai proses perencanaan anggaran, implementasi sampai pada tahap evaluasinya.¹⁷

Vita Andini Yulicha dalam skripsi yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Yayasan *Bakong Pittaya School* Pattani Thailand Selatan menjelaskan bahwa Proses perencanaan pembiayaan di *Bakong Pittaya School* dilakukan mulai awal bulan April sampai dengan Juni. Dalam tiga bulan tersebut, *Bakong Pittaya School* akan melakukan rapat bersama dewan yayasan dan guru, kemudian akan di sahkan oleh yayasan yang nantinya akan diajukan kepada pihak Kerajaan Thailand. Setelah diterima, pihak kerajaan akan memberikan dana sesuai dengan laporan jumlah siswa. Proses pembelanjaan pembiayaan di *Bakong Pittaya School* berupa dana yang diperoleh dari kerajaan sebesar 1,4 juta THB untuk seluruh biaya operasional, sedangkan biaya untuk gaji guru dan karyawan sebesar 1,2 juta THB. Proses Pengawasan dilakukan oleh departemen pendidikan setempat yang dilakukan pada awal dan akhir semester. Sedangkan dilingkup sekolah adalah manajer utama sendiri yang dilakukan secara insidental. Proses pertanggungjawaban pembiayaan di *Bakong Pittaya School* berupa laporan terperinci dengan memuat bukti pengeluaran dan pemasukan berupa kwitansi yang akan disampaikan setiap bulan Maret . Hambatan *Bakong Pittaya School* dalam pembiayaan pendidikannya adalah ketika dana yang diberikan oleh pihak kerajaan tidak cukup untuk memenuhi segala kegiatan.¹⁸

Jurnal terkait yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Padas Yang Efektif menjelaskan bahwa : Pembiayaan pendidikan diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten dan kota serta propinsi maupun masyarakat dan dunia usaha. Pembiayaan pendidikan direncanakan berdasarkan pada kebutuhan sekolah sesuai dengan skala prioritas yang meliputi: gaji guru, gaji pegawai, kesejahteraan, peningkatan sumber daya

¹⁷ Nur Khanan, *Model Manajemen Keuangan Pendidikan Di Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Kembaran Banyumas Tahun 2016*, (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2016)

¹⁸ Vita Andini Yulicha, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Yayasan Bakong Pittaya School Pattani Thailand Selatan*, (Purwokerto, Skripsi IAIN Purwokerto, 2018)

manusia, pembiayaan sarana dan prasarana dan peningkatan potensi siswa dan guru. Perwujudan pembiayaan pendidikan diimplementasikan dalam peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta melakukan bimbingan secara intensif kepada siswa terutama menghadapi ujian akhir nasional. Untuk di luar proses belajar mengajar diberikan pengembangan bakat dan minat siswa yang didukung dengan sarana dan prasarana yang maksimal.¹⁹

F. Sistematika Penelitian

Garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan sebagai berikut;

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori berisi tentang pokok bahasan mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Hal tersebut meliputi Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat adalah gambaran umum mengenai MTs PAKIS, penyajian data dan analisis data mengenai manajemen pembiayaan pendidikan di MTs PAKIS.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini dan saran-saran yang ditujukan untuk pihak terkait.

¹⁹ Budi Budaya, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Yang Efektif, *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, Universitas Wisnuwardhana Malang, Volume. 18, Nomer 1, Hal 42-59

Kemudian di bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat merupakan biaya yang diterapkan oleh sekolah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam suatu wilayah. Pembiayaan seperti itu sangat membantu terutama bagi masyarakat yang tingkat ekonominya rendah. Mereka yang peduli akan pendidikan namun tidak bisa mengakses pendidikan karena terkendala masalah biaya.

Model manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat di terapkan di MTs PAKIS bertujuan untuk membantu anak-anak di daerah pelosok yang putus sekolah karena masalah biaya. Biaya pendaftaran yang unik diterapkan di MTs PAKIS sesuai dengan perekonomian masyarakat setempat.

Respon masyarakat yang luar biasa baik dan mendukung menjadikan pengelola MTs PAKIS selalu meningkatkan semangat dan optimis dalam mengembangkan pendidikan di dusun pesawahan. Keberadaan MTs PAKIS telah memberi harapan baru bagi warga setempat. Mereka berharap keberadaan sekolah dapat memberi pelita kehidupan yang lebih baik bagi generasi muda di dusun Pesawahan dan Karang Gondang.

B. Saran-Saran

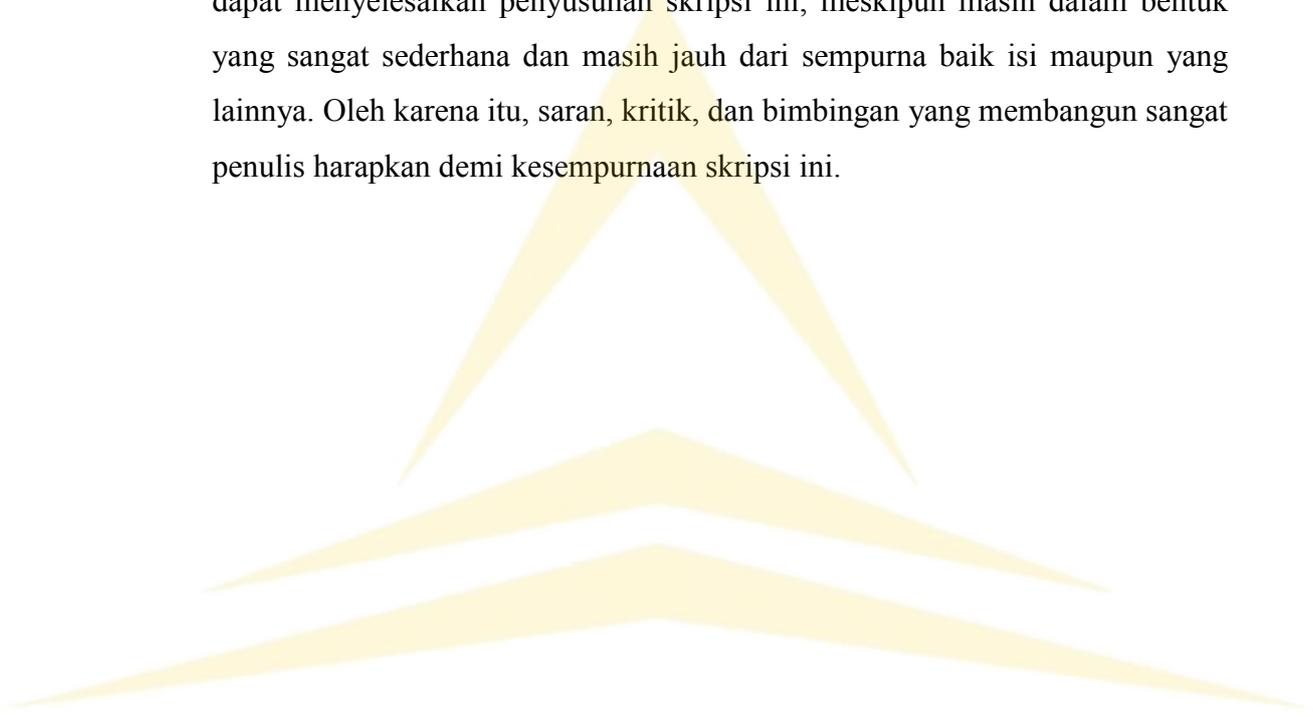
1. Bagi kepala sekolah
 - a. Meningkatkan komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat tentang pendidikan agar pola pikir masyarakat (*mindset*) maju
 - b. Meningkatkan pengelolaan manajemen pembiayaan agar lebih terkontrol
2. Bagi relawan

Para relawan harus terus berjuang memotivasi dan mendidik agar para anak buruh tani, penderes nira kelapa hingga pinus itu biar terus semangat bersekolah.

3. Bagi masyarakat
 - a. Harus terus berupaya untuk mendorong semangat kemajuan anak-anak desa setempat terutama dalam bidang pendidikan
 - b. Terus mendukung program-program pendidikan di MTs PAKIS

C. Kata Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih jauh dari sempurna baik isi maupun yang lainnya. Oleh karena itu, saran, kritik, dan bimbingan yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Andini Yulicha, Vita. 2018. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Yayasan Bakong Pittaya School Pattani Thailand Selatan*, Purwokerto, Skripsi IAIN Purwokerto.
- Arwildayanto Dkk, 2017. *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Ikijabar.
- Ari Kunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2000
- Arifin, Zaenal. 2014. *Penelitian Pendidikan: Metode Dan Paradigma Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Asfila, dkk. 2015. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Mtsn Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. Vol 3, No. 4
- Asmani, Jamal M. 2012. *Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Jogjakarta: Diva Press
- Dakir, Arbagi. 2018. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Depok: Prenadamedia Group
- Dosen Poltekpar, 2017, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu*, *Jurnal Ansiru PAI* Vol. 1 No. 2
- Fattah, Nanang. 2002. *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Roskarya.
- Hizbul Muflikhin, Mukh. 2013. *Administrasi Pendidikan Tinjauan Teori Untuk Praktek Manajerial Bagi Guru Dan Pimpinan Sekolah*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Idori Anwar, Moch. 2013. *Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya Pendidikan Eidsi Revisi*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Jamalie, Zulfa. 2017. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat: Studi Pada Mts Darul Ulum Palangka Raya*, *FENOMENA*, Volume 9, No 1
- Khanan, Khanan. 2016. *Model Manajemen Keuangan Pendidikan Di Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Kembaran Banyumas Tahun 2016*, Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto.
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Martin. 2014. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep Dan Aplikasinya*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada

- Miftakhul Hidayah, Alfi. 2019. *Manajemen Keuangan Pondok Pesantren At-Taujiah Al-Islamy Leler Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas*, Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto
- Minarti, Sri. 2014. *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah , Konsep, Strategi Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2014. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Mustari, Mohamad. 2014. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT Gajah Grafindo.
- Nurkolis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Parno, Rahmini. 2010. *Manajemen Keuangan*. Purwokerto: Stain Press.
- Prihatin, Eka. 2014. *Teori Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Satori, Djama'an. Dan Aan Komariah. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sudjana, Dkk. 2004. *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production.
- Sugiono. 2103 *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D ,* Bandung: Alfabeta
- Sujanto, Bedjo. 1999. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah Model Pengelolaan Di Era Otonomi Daerah*. Sagung Seto: Jakarta
- Sukmadinta , Nana Syaodah. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wiyani, Novan Ardy. 2018. *Pendidikan Karakter Snsk Konsep Dan Implementasi Di SD Dan MI*, Purwokerto: STAIN Press
- Wiyani, Novan Ardy. 2012. *Desain Manajemen Pendidikan Karakter Di Madrasah*, *INSANIA* Volume. 17. No, 1.